

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Junaidi, H. *Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1975.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Meilany, Andi Nur Annisa. *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Puspa, Van Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Wahab, Muhammad. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Artikel Jurnal

Ahmad, Ulya Ardhia Cahyani. "Validitas dan Risiko Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Perdata di Indonesia." *Jurnal Salimiya*, 2023.

Redi, Ahmad. "Regulasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum IUS9*, No. 3 (2021): 333–335.

Anhar, H. I. "Akibat Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Pasal 38 UUJN." *Officium Notarium* 4, No. 2 (2025): 316–339.

Arbaya, N. R., dan Baidhowi. "The Legal Basis of Electronic Signatures in Civil Dispute Evidence in Indonesia: A Study of the ITE Law." *Annual Review of Legal Studies*, 2022: 20.

Cahayani, D. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 3, No. 10 (2024): 853–860.

Muryati, Dewi Tuti. "Harmonisasi UU Jabatan Notaris dan UU ITE dalam Konsep Cyber Notary." *Jurnal Fiat Justisia* 14, No. 4 (2020): 422–424.

Anugerah, Dian Purnama. "Digitalisasi Layanan Kenotariatan dan Implikasinya terhadap Keotentikan Akta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 2 (2023): 312–314.

Darusman, Y. M. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum*, 2014: 56.

- Sugianto, Fajar. "Cyber Notary sebagai Pembaharuan Hukum Kenotariatan." *Jurnal Hukum Novelty* 12, No. 1 (2021): 21–23.
- Gunawan, M., dan Erniyanti. "Implementation of Electronic Signatures and E-Notarization within the Indonesian Notarial Legal Framework." *International Journal of Sociology and Law*, 2023: 77.
- Harefa, A. F., Marwenny, E., dan Citra, H. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pelaksanaan Cyber Notary." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2023.
- Setiawan, Hendra. "Problematika Harmonisasi UU Jabatan Notaris dan UU ITE." *Jurnal Supremasi Hukum* 18, No. 1 (2022): 112–114.
- Permatasari, Indah. "Implementasi Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Bisnis Digital." *Jurnal De Jure* 14, No. 1 (2022): 59–61.
- Hanim, Lathifah. "Eksistensi Akta Autentik di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, No. 1 (2019): 75–77.
- Lestari, H., Mufharichah, I., Wahda, W., dan Aulia, L. "Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Kritis terhadap Kekosongan Regulasi dan Tantangan Implementasi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 2 (2025): 1847–1854.
- Margianto, R., Patonah, S., Lisnawati, S., dan Santoso, C. J. "Tanda Tangan Elektronik untuk Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi." *Jurnal Lex Specialis*, 2021: 42.
- Syaifuddin, Muhammad. "Akta Notaris dalam Perspektif Digitalisasi Hukum." *Jurnal Arena Hukum* 12, No. 1 (2019): 52–54.
- Nasrudin, U. "The Concept of Statement of Heirs to Support Legal Certainty in Indonesia." *International Journal of Latin Notary* 1, No. 1 (2020): 9–16.
- Nisa', Naili Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5, No. 2 (2020): 36.
- Imaniyati, Neni Sri. "Kepastian Hukum dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 37, No. 2 (2018): 118–120.

- Putri, A. M. H., dan Wahyuningsih, W. "Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi: Tantangan dan Peluang Implementasi Cyber Notary di Indonesia." *Rekomendasi Hukum* 1, No. 1 (2025): 23.
- Putra, M. S. W. "Kekuatan Akta Elektronik sebagai Alat Bukti pada Transaksi E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Inovasi Global* 2, No. 2 (2024): 26.
- Hartanto, Ratna. "Problematisasi Implementasi Akta Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pandecta* 14, No. 2 (2019): 201–203.
- Shahrullah, Rina Shahriyani. "Transformasi Digital Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Siber." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (2022): 189–191.
- Rizqi, F., dan Sari, S. N. I. "Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 16.
- Saruji, V., dan Martana, N. "Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan pada Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2015): 41.
- Salsabila, P. N. T., dan Patras, G. "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2023: 51.
- Setiadewi, K., dan Hendra Wijaya, I. M. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No. 1 (2020): 126–134.
- Simatupang, Taufik H. "Disharmoni Pengaturan Cyber Notary dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 4 (2020): 489–491.
- Wicaksono, R. B. P. "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2024): 34.
- Wulandari, M. "Legal Review of the Validity of Electronic Deeds in International Business Transactions: An Indonesian Notary's Perspective." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 6, No. 1 (2025): 289–299.

Yasya, A. C. P., dan Mekka Putra, M. F. "Peningkatan Fungsi Notaris dalam Era Digital melalui Cyber Notary." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 8 (2023): 45.

Yogiatama, L. R. "Tinjauan Yuridis Konsep Cyber Notary dalam Penyimpanan Protokol Notaris Ditinjau dari UU Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, No. 8 (2025): 258–263.

Karya Ilmiah

Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Denpasar, 2020.

Listiyani, Novita. *Kekaburan Terminologi "Mensertifikasi" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU ITE

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Klarifikasi Gim.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012.

Website

Direktorat Jenderal Pajak. “Apa yang Dimaksud dengan Sertifikat Elektronik. <https://www.pajak.go.id/id/7-apa-yang-dimaksud-dengan-sertifikat-elektronik> Diakses pada 4 April 2025).

NotaryCam. “Remote Online Notary Laws: Which States Allow Online Notarization in 2025.” <https://www.notarycam.com/remote-online-notary-laws-which-states-allow-online-notarization-in-2025/> Diakses pada 25 November 2025.